



DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

LAPORAN KINERJA



2023



*ASISTEN DEPUTI
KEMITRAAN PEMUDA*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga laporan kinerja pada unit kerja Asisten Deputi Kemitraan Pemuda tahun 2023 dapat disusun sesuai data dan ketentuan yang berlaku.

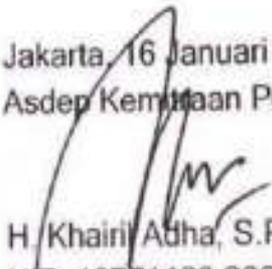
Laporan ini disusun atas dasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja yang disampaikan Asisten Deputi Kemitraan Pemuda merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan dan seluruh *stakeholders* yang berkepentingan yakni Menteri Pemuda dan Olahraga, Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Selain itu, laporan kinerja pada Asdep Kemitraan Pemuda adalah sumber informasi internal, sebagai perwujudan capaian keberhasilan kinerja ataupun hambatan/kegagalan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja mendatang.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan semua program dan kegiatan pada unit kerja Asdep Kemitraan Pemuda.

Jakarta, 16 Januari 2024
Asdep Kemitraan Pemuda


H. Khairil Adha, S.Pd., M.Si
NIP. 19771120 200312 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

1.1

Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional

Target: 436 Orang; Realisasi : 539 Orang

Jumlah koordinasi dengan stakeholder kemitraan pemuda

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen

1.2

2.1

Jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan

Target : 10 K/L; Realisasi : 27 K/L

Jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan

Target : 27 Provinsi

Realisasi : 28 Provinsi, 3 Kab/Kota

2.2

2.3

Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan

Target : 75%

Realisasi : 91,18%

REALISASI ANGGARAN TA 2023
PAGU : RP 15.916.288.000,-
REALISASI : RP 15.437.871.833,-
96,99%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
LATAR BELAKANG	2
GAMBARAN UNIT KERJA.....	3
DASAR HUKUM.....	6
SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
RENCANA STRATEGIS	8
PENETAPAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
PENGUKURAN KINERJA.....	12
CAPAIAN KINERJA	13
CAPAIAN KINERJA JUMLAH PEMUDA KADER YANG TERFASILITASI DALAM KEGIATAN KEPEMUDAAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL	13
CAPAIAN KINERJA JUMLAH KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER KEMITRAAN PEMUDA	19
CAPAIAN KINERJA JUMLAH KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG TERLIBAT AKTIF DALAM PENCAPAIAN TARGET RAN PELAYANAN KEPEMUDAAN	23
CAPAIAN KINERJA JUMLAH PROVINSI ANG MELAKUKAN PENYUSUNAN RAD KEPEMUDAAN	28
CAPAIAN KINERJA PERSENTASE TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR LAYANAN	31
ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA.....	37
REALISASI ANGGARAN	39
BAB IV.....	41
PENUTUP	41
SIMPULAN.....	41
REKOMENDASI.....	42

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Asisten Deputi Kemitraan Pemuda berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

LKj yang disusun adalah menyampaikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target dan membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan

pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). LKj dimaksud merupakan hasil dari proses yang berupa rencana kinerja tahunan. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses yang dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan serta kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Kemitraan Pemuda Tahun 2023 juga merupakan pemenuhan kewajiban pimpinan terkait hasil pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

GAMBARAN UNIT KERJA

Asisten Deputi Kemitraan Pemuda merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah koordinasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Tugas dan fungsi Asisten Deputi Kemitraan Pemuda diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Asisten Deputi Kemitraan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan pemuda.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Kemitraan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dalam pelaksanaan tugas Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- b) Pengelolaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan.
- c) Pengoordinasian dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).
- d) Koordinasi pelaksanaan Indeks Pembangunan Pemuda.

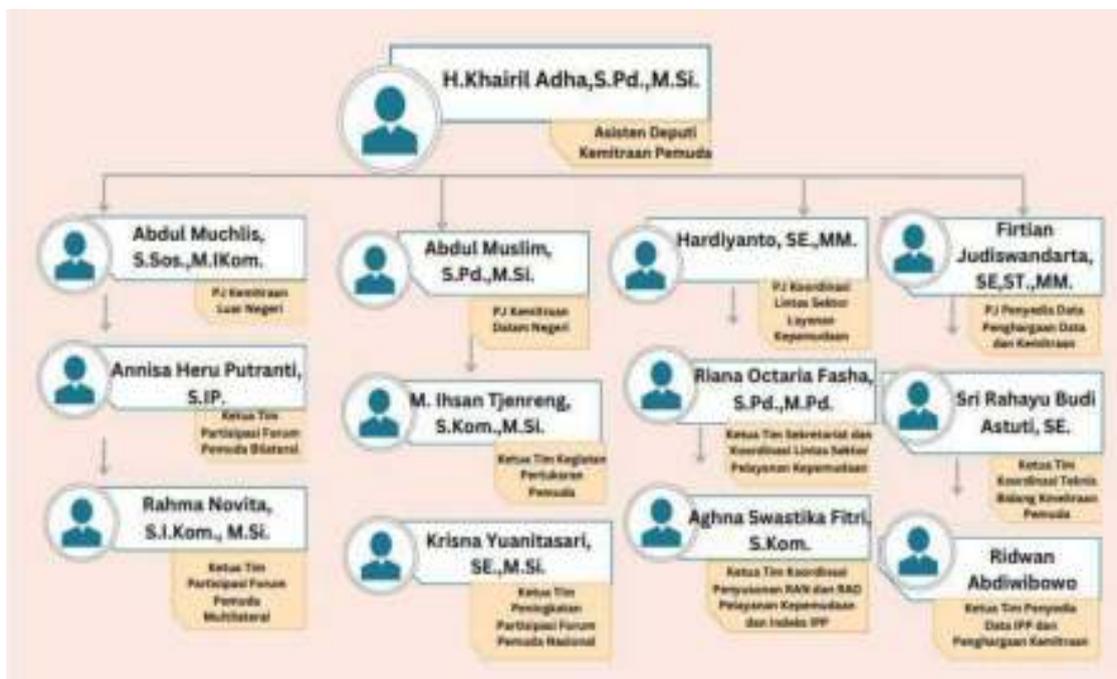
- e) Pengoordinasian partisipasi pemuda dalam forum kepemudaan internasional.
- f) Pelaksanaan pertukaran pemuda.
- g) Pemberian penghargaan terhadap stakeholders kepemudaan.
- h) Penyediaan data di bidang Kemitraan Pemuda.
- i) Pelaksanaan kemitraan teknis di bidang Kemitraan Pemuda.

Adapun Asisten Deputi Kemitraan Pemuda dibantu oleh 4 (empat) Penanggung Jawab sebagai berikut:

- a) Penanggung Jawab Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan;
- b) Penanggung Jawab Kemitraan Dalam Negeri;
- c) Penanggung Jawab Kemitraan Luar Negeri;
- d) Penanggung Jawab Penyediaan Data Penghargaan Data dan Kemitraan Pemuda Bidang Kemitraan Luar Negeri

Setiap penanggung jawab dibantu oleh 2 (dua) Ketua Tim di tiap bidang. Selain itu, unit kerja ini juga dibantu oleh ASN dan tenaga honorer. Hingga akhir Desember 2023, total pegawai pada unit kerja ini sebanyak 18 orang.

Adapun struktur organisasi pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda sebagai berikut:



No	Nama	Golongan	Jabatan
1	H. Khairil Adha, S.Pd.,M.Si.	IV/b	Asisten Deputi Kemitraan Pemuda
2	Abdul Muslim, S.Pd.,	IV/b	Penanggungjawab Kemitraan Dalam

	M.Si.		Negeri
3	Hardiyanto, S.E., M.M.	IV/b	Penanggungjawab Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan
4	Firtian Judiswandarta, S.E., S.T., M.M.	IV/b	Penanggungjawab Penyediaan Data Penghargaan Data dan Kemitraan
5	Abdul Muchlis, S.Sos., M.Ikom	IV/b	Penanggungjawab Kemitraan Luar Negeri
6	Riana Octaria Fasha, S.Pd.,M.Pd.	IV/a	Ketua Tim Sekretariat dan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan
7	Aghna Swastika Fitri, S.Kom.	III/c	Ketua Tim Koordinasi Penyusunan RAN dan RAD Pelayanan Kepemudaan dan Indeks IPP
8	Sri Rahayu Budiastuti,SE	III/d	Ketua Tim Koordinasi Teknis Bidang Kemitraan Pemuda
9	Ridwan Abdiwibowo, S.Ag.	III/c	Ketua Tim Penyedia Data IPP dan Penghargaan Kemitraan
10	Annisa Heru Putranti, S.IP.	III/c	Ketua Tim Peningkatan Forum Peningkatan Partisipasi Forum Pemuda Bilateral
11	Rahma Novita, S.I.Kom., M.Si.	III/d	Ketua Tim Peningkatan Forum Peningkatan Partisipasi Forum Pemuda Multilateral
12	M. Ihsan Tjenreng, S.Kom., M.Si.	III/d	Ketua Tim Kegiatan Pertukaran Pemuda
13	Krisna Yuanitasari, SE.,M.Si.	III/b	Ketua Tim Peningkatan Forum Peningkatan Partisipasi Forum Pemuda Nasional
14	Muhammad Jafar Ash Shadiq, SE	-	Anggota Tim Koordinasi Teknis Bidang Kemitraan Pemuda
15	David Wirawan	-	Angota Tim Peningkatan Partisipasi Forum Pemuda Nasional
16	Fachriansyah Darmawan	-	Staf pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda
17	Meola Melodia	-	Staf pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda
18	Niken Pristania	-	Anggota Tim Sekretariat dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan

DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Asisten Deputi Kemitraan Pemuda Tahun 2023 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0057 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini menjelaskan pencapaian kinerja pada unit kerja Asisten Deputi Kemitraan Pemuda Tahun 2023. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa depan.

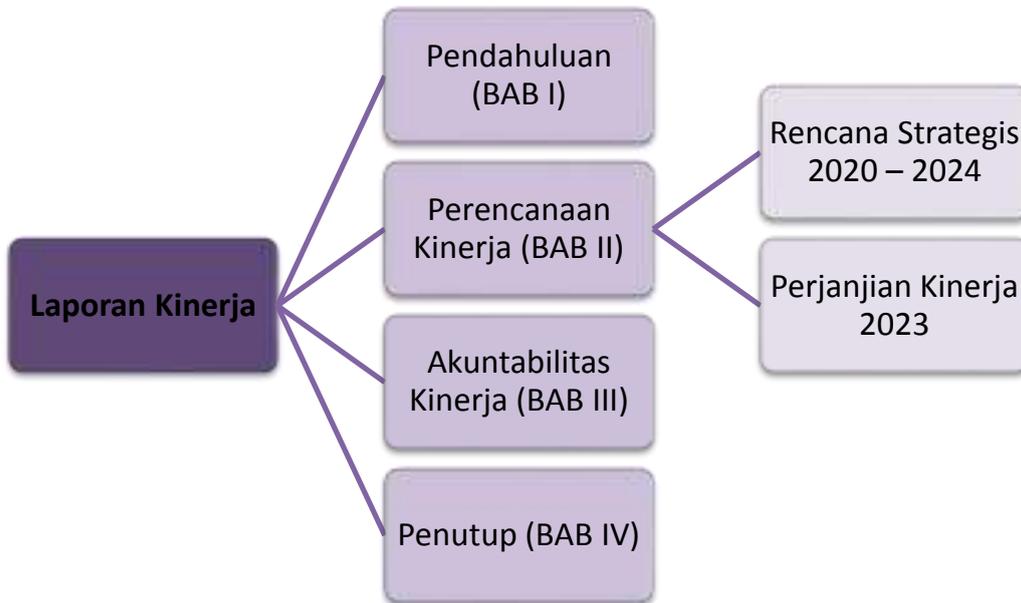
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja pada unit kerja Asisten Deputi Kemitraan Pemuda tahun 2022, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan gambaran singkat unit kerja (mencakup tugas dan fungsi, struktur organisasi), dasar hukum dan sistematika penyajian.

Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan penetapan kinerja dan perjanjian kinerja Asisten Deputi Kemitraan Pemuda .

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, capaian kinerja, realisasi anggaran, realisasi program/kegiatan, dan analisis capaian kinerja.

Bab IV : Penutup, kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, terdapat 4 tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan. Masing-masing periode RPJMN tersebut memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda. Tema RPJMN tahun 2020-2024 atau RPJMN ke-4, adalah “Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing”. Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, telah ditetapkan RPJMN tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada tanggal 20 Januari 2020 yang menjadi landasan bagi setiap K/L untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis merujuk pada Draft (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2020-2024. Rencana strategis ini telah mengakomodasikan kebutuhan penyesuaian akan program dan kegiatan prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawab Kementerian Pemuda dan Olahraga. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, khususnya pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang ditandai dengan:

1. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, berintegrasi dan profesional di lingkup deputi;
2. Meningkatnya *good governance & clean government* di lingkup deputi;
3. Meningkatnya layanan sistem informasi dan publikasi yang responsive dan transparan di lingkup deputi; dan
4. Terkelolanya anggaran yang optimal dan akuntabel di lingkup deputi.

PENETAPAN KINERJA

Proses perencanaan dan penetapan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perencanaan dan penetapan kinerja tersebut dituangkan dalam berbagai program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja Eselon II, serta berupaya mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target

yang hendak dicapai tahun 2023.

Adapun perjanjian kinerja pada unit Kerja Asdep Kemitraan Pemuda tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan dan kesepakatan internasional	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional	436 Orang
	Jumlah koordinasi dengan stakeholder kemitraan pemuda	1 Dokumen
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi pelayanan kepemudaan	Jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan	10 Orang
	Jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	27 Provinsi
	Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan	75%

Total anggaran Asisten Deputi Kemitraan Pemuda untuk menjalankan program dan kegiatan tahun 2023 adalah sebesar Rp 15.916.288.000,-.

Perjanjian kinerja ini menjadi sumber rujukan utama perjanjian kinerja bidang-bidang yang berada dalam struktur Asisten Deputi Kemitraan Pemuda, yang meliputi Bidang Kemitraan Dalam Negeri, Kemitraan Luar Negeri, Koordinasi Lintas Sektor Layanan, serta Penyedia Data Penghargaan Data dan Kemitraan Pemuda.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Khairil Adha, S.Pd, M.Si

Jabatan : Asisten Deputi Kemitraan Pemuda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Raden Isnanta, M.Pd

Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua,

Dr. Raden Isnanta, M.Pd

Pihak Pertama,

H. Khairil Adha, S.Pd, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI KEMITRAAN PEMUDA**

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan dan kesepakatan internasional	1.1 Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional	436 Orang
		1.2 Jumlah koordinasi dengan stakeholder kemitraan pemuda	1 Dokumen
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan	2.2 Jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan	10 K/L
		2.2 Jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	27 Provinsi
		2.3 Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan	75%

Kegiatan :
Pengembangan Kemitraan Pemuda

Anggaran
Rp. 15.916.288.000

Jakarta, September 2023

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda,

Asisten Deputi Kemitraan Pemuda,

Dr. Raden Isnanta, M.Pd

H. Khairil Adha, S.Pd, M.Si

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan data kinerja, dan penetapan capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja yang menjadi dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2023.

Dalam mengukur kinerja sasaran digunakan indikator kinerja *output* dan *outcome*, sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi *input* dan *outcome*. Indikator *input* berupa dana, sedangkan indikator *output* dan *outcome* antara lain meliputi jumlah peserta, jumlah naskah, jumlah pedoman, jumlah paket fasilitasi dan satuan lainnya.

Uraian tentang Rencana Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Asdep Kemitraan Pemuda, dimana terlihat sasaran strategis yang ingin dicapai beserta indikator kinerja dan targetnya. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Kemitraan Pemuda, maka tugas pokok dan fungsi Asisten Deputi Kemitraan Pemuda direalisasikan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2023.

Adapun realisasi program/kegiatan, capaian misi, dan capaian sasaran strategis Asdep Kemitraan Pemuda tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian Target	%	Pagu Anggaran	Realisasi Pagu Anggaran	%
Meningkatnya pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan dan kesepakatan internasional	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional	436 Orang	539 Orang	123,62	12.933.288.000	12.566.789.891	97,17
	Jumlah koordinasi dengan stakeholder kemitraan pemuda	1 Dokumen	1 Dokumen	100	843.978.000	839.220.927	99,44
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi pelayanan kepemudaan	Jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan	10 K/L	27 K/L	270	515.882.000	509.380.000	98,74
	Jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAD	27 Provinsi	27 Provinsi, 3 Kabupate	103,70	1.107.258.000	1.013.101.015	91,50

	kepemudaan		n/Kota				
	Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan	75%	82,35%	109,80	515.882.000	509.380.000	98,74

CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Jumlah Pemuda Kader yang Terasilitasi dalam Kegiatan Kepemudaan Nasional dan Internasional



No	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
1.1	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional	436 Orang	539 Orang	123,62%	Melampaui target

Pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional adalah jumlah pemuda yang mendapatkan fasilitas dalam kegiatan kepemudaan baik diskala nasional maupun internasional. Fasilitas kepemudaan nasional dan internasional merupakan salah satu kegiatan penting dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda. Tujuan fasilitas ini selain mengenalkan karya-karya pemuda Indonesia ke forum dunia, juga untuk meningkatkan wawasan dan perspektif baru di bidang yang ditekuni, membagi pengalaman dan hasil inovasi mereka ke publik internasional.

Bantuan fasilitas tersebut dapat diterima oleh perorangan, lembaga, organisasi, yayasan, forum, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyelenggarakan atau mengikuti berbagai event kepemudaan berskala internasional, baik yang berlangsung di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan semakin banyak pemuda Indonesia yang terlayani dalam meningkatkan wawasan pemuda, meningkatkan prestasi, semangat profesionalisme serta partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai kegiatan positif untuk membangun kemandirian

pemuda dan daya saing pemuda.



Capaian indikator jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional diukur dengan menjumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan kepemudaan baik diskala nasional maupun internasional. Adapun kegiatan yang berkontribusi untuk mencapai IKU 1.1 antara lain:

No	Kegiatan	Jumlah Peserta	Anggaran	Realisasi Anggaran	
1	Pertukaran Pemuda Indonesia-Australia	62	5.561.548.000	5.535.827.288	
2	Pertukaran Pemuda Indonesia-Korea	63			
3	Pertukaran Pemuda Indonesia-Singapura	62			
4	ASEAN Youth Interfaith Camp 2023	60	1.192.274.000	1.190.770.400	
5	Fasilitasi Pengiriman Delegasi pada Event-Event :		1.925.806.000	1.640.876.769	
		14th China ASEAN Youth Campus, Tiongkok			5
		JENESYS2022 Outbound Program for Indonesia			15
		ECOSOC Youth Forum 2023, Amerika Serikat			7
		ASEAN-Japan 50th JENESYS U-17 Women's Memorial Cup, Jepang			19

	JENESYS High School Student Exchange	8		
	Global Youth Summit, Republik Korea	3		
	ASEAN Youth Dialogue, Jakarta	10		
	ASEAN Youth Interface with ASEAN Leader, Labuan Bajo	2		
	MIKTA Young Leaders' Camp 2023, Republik Korea	5		
	JENESYS 2023 ASEAN-Japan Students Conference, Jepang	10		
	The 4th Asean-India Youth Summit "Strengthening Asean India Parthersip In The Indo-Pacific"	11		
	JENESYS Outbond Program Indonesia Tahun 2023	39		
6	Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) 2023	70	1.945.358.000	1.933.469.295
7	Forum Pengembangan Kemitraan Pemuda	38	1.213.260.000	1.211.285.000
8	Program Internasional Kapal pemuda Asean-Jepang (SSEAYP)	11	1.945.358.000	1.933.469.295
10	Bantuan Event-Event dan Pengiriman Delegasi Meeting Kepemudaan Tingkat Nasional	39	1.213.260.000	1.211.285.000
Total		539 (123,62%)	12.933.288.000	12.566.789.891

Untuk mencapai capaian IKU Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional, Asisten Deputi Kemitraan Pemuda telah menetapkan Pagu anggaran TA 2023 sebesar Rp **12.933.288.000,-** dan realisasi yang tercatat selama TA 2023 adalah sebesar Rp. **12.566.789.891,-** atau **97,17%**.





Perbandingan jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional 2021 – 2023.

Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi dalam Kegiatan Kepemudaan Nasional dan Internasional	
2023	539 Orang
2022	908 Orang
2021	147 Orang

Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional pada tahun 2023 adalah sebanyak 539 orang atau 123,62% dari target. Analisis keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini adalah maksimalnya kinerja pada Kemitraan Dalam Negeri dan Luar Negeri pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda. Perencanaan yang baik dan eksekusi di lapangan merupakan kunci keberhasilan program kegiatan.



Secara angka, jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional tahun 2023 lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa faktor yang menyebabkan ini terjadi adalah banyak kegiatan kepemudaan di tahun 2022 dilakukan secara daring sehingga dapat menampung lebih banyak peserta.

Terlaksananya kegiatan kepemudaan nasional untuk mewujudkan kerjasama dan jaringan kerja antar para Pemuda dalam rangka mempercepat pembangunan kepemudaan di setiap provinsi di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Memfasilitasi pemuda dalam kegiatan peningkatan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku serta keterampilannya;
- b. Menumbuhkan motivasi pemuda untuk terus berprestasi, meningkatkan

partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kepemudaan menuju tercapainya pemuda maju dan berdaya saing;

- c. Menggerakkan potensi sumber daya masyarakat terutama pemuda sebagai aset dalam rangka mendorong dan mempercepat proses pembangunan Kepemudaan.

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2009. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, memberikan peluang dan fasilitas bagi pengembangan para pemuda untuk berperan aktif di bidang Pertukaran Pemuda Antar Negara. Upaya tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah agar para pemuda dapat menyalurkan seluruh bakat minat, kreasi, inovasi dan daya saing antar pemuda. Selain itu Program Pertukaran Pemuda Antar Negara ini dapat menjadikan alat promosi bagi Indonesia di kancah internasional, khususnya di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pada Pasal 18 yang berbunyi: Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pemberian peluang, fasilitas dan bimbingan” adalah pelayanan yang dilakukan, antara lain, melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kewirausahaan, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, bela negara, serta pertukaran pemuda antarnegara.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Indikator Kerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
a.	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional	123,62	97,17	26,46

Tingkat efisinesinya untuk mencapai indikator Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional adalah sebesar 26,46. Hal ini menunjukkan bahwa adanya efisiensi untuk mencapai IKU adalah sebesar 26,46.

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN IKU

Program atau kegiatan yang menunjang indikator Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional antara lain Program Pertukaran Antar Negara (PPAN) yang terdiri dari Pertukaran Pemuda Indonesia – Australia, Pertukaran Pemuda Indonesia – Korea, dan Pertukaran

Pemuda Indonesia – Singapura; Fasilitasi Pengiriman Delegasi pad Event Internasional, Bantuan Pengiriman Delegasi Meeting Kepemudaan Tingkat Internasional, Program Internasional Kapal pemuda ASEAN-JEPANG (SSEAYP), serta Program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) 2023 dan Forum Pengembangan Kemitraan Pemuda.

Tercapainya IKU jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional tidak lepas dari keterlibatan dari pemuda daerah di setiap program Asisten Deputi Kemitraan Pemuda. Tingginya antusias dan partisipasi pemuda menjadi kunci keberhasilan program, sehingga diharapkan terjaganya komunikasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah pusat, dan organisasi pemuda daerah.

Capaian Kinerja Jumlah Koordinasi dengan Stakeholder Kemitraan Pemuda



No	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
1.2	Jumlah koordinasi dengan stakeholder kemitraan pemuda	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Mencapai target



Keterlibatan pemuda sebagai subjek pembangunan menjadi bagian penting untuk memaksimalkan peran pemuda sebagai agen kunci perubahan sosial, pembangunan ekonomi dan juga inovasi teknologi. Sejarah menunjukkan peran pemuda sebagai subjek dalam pelbagai perubahan sosial di Indonesia. Pemuda juga tak sedikit yang telah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi. Catatan pemuda sebagai pelaku inovasi teknologi juga menghiasi perjalanan Bangsa Indonesia. Pemuda perlu terus didorong, diupayakan dan difasilitasi untuk memaksimalkan potensinya sebagai generasi produktif, kreatif dan inovatif. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pemenuhan kebutuhan pembangunan pemuda. Untuk itulah diperlukan pemetaan dan pengkajian untuk memantau capaian pembangunan pemuda.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) setidaknya memiliki empat fungsi utama. Pertama; memberikan informasi mengenai indikasi secara keseluruhan — lintas wilayah dan lintas sektor — tentang kemajuan pembangunan pemuda. Dari indikasi tersebut memberikan gambaran arah kebijakan pembangunan pemuda lintas wilayah dan lintas sektor. Pada gilirannya diharapkan berbagai aspek kehidupan dan

kesejahteraan pemuda dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan kebijakan dan program pemuda yang berbasis data. Kedua, menjadi pengarah dan insentif bagi domain atau indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus para pemangku kepentingan—pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, serta kelompok pemuda sendiri. Ketiga, sebagai instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan pemuda yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antar wilayah serta menunjukkan dampak yang telah disepakati bersama di antara para pemangku kepentingan.

Laporan IPP kini telah menjadi instrumen resmi terkait indikator peningkatan kualitas pemuda pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Adapun Laporan IPP 2023 merupakan bagian dari laporan IPP tahunan yang menyajikan dan menganalisis capaian pembangunan pemuda dalam kerangka indeks pembangunan pemuda. Laporan IPP 2023 menjadi bagian dari penyediaan data dan informasi yang riil dan mencerminkan dinamika kinerja pembangunan pemuda.

Untuk mencapai capaian IKU Jumlah Koordinasi Dengan Stakeholder Kemitraan Pemuda, Asisten Deputi Kemitraan Pemuda telah menetapkan Pagu Anggaran TA 2023 sebesar Rp 843.978.000,- dan realiasi yang tercatat adalah sebesar RP 839.220.927,- atau sebesar 99,44%.

Rincian Kegiatan	Pagu	Realisasi
Indeks Pembangunan Pemuda	843.978.000	839.220.927
Persentase Realisasi terhadap Anggaran	99,44%	



Untuk IKU Jumlah Koordinasi Dengan Stakeholder Kemitraan Pemuda tidak memiliki perbandingan di tahun-tahun sebelumnya karena baru ada di Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Kemitraan Pemuda di tahun 2023.

Analisa ketercapaian IKU Jumlah Koordinasi Dengan Stakeholder Kemitraan Pemuda adalah terlaksananya kegiatan Launching dan Sosialisasi Indeks Pembangunan Pemuda. Dengan terlaksananya kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) dokumen berupa buku Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2023. Dengan dihasilkan buku ini diharapkan menjadi gambaran capaian IPP di Indonesia. Sehingga menjadi dasar perbaikan pada kebijakan pemuda.

- a. Pengambil kebijakan sektoral agar menjadikan capaian pembangunan pemuda berdasarkan masing-masing domain sebagai bahan evaluasi bagi kebijakan pembangunan pemuda.
- b. Memaksimalkan peran Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam tata kelola kebijakan pembangunan kepemudaan secara nasional.
- c. Perlunya meningkatkan peran pemerintah daerah (baik provinsi dan kabupaten/kota) dalam keberhasilan perbaikan capaian pembangunan pemuda.
- d. Persoalan pada tiap domain pembangunan pemuda tidak benar-benar terpisah satu sama lain. Beberapa faktor kunci teridentifikasi memengaruhi capaian lebih dari satu domain.
- e. Pembentukan faktor-faktor kunci merupakan hal strategis yang perlu dilakukan karena memiliki daya ungkit yang besar untuk mendorong kinerja lebih dari satu domain pembangunan pemuda.
- f. Setiap daerah di Indonesia, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, memiliki dinamika persoalan kepemudaan yang beragam. Penting bagi setiap Provinsi untuk memiliki kajian masing-masing terutama pada domain atau indikator yang mengalami penurunan, atau masih di bawah capaian Nasional.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Indikator Kerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
a.	Jumlah koordinasi dengan stakeholder kemitraan pemuda	100	99,44	0,56

Tingkat efisiensi untuk mencapai indikator jumlah koordinasi dengan stakeholder kemitraan pemuda adalah sebesar 0,56. Hal ini menunjukkan bahwa adanya efisiensi untuk mencapai IKU adalah sebesar 0,56. Walaupun secara angka, IKU ini dapat tercapai secara efektif atau tercapai sesuai dengan anggaran yang tersedia.

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN IKU

Program yang menunjang indikator koordinasi dengan stakeholder kemitraan pemuda adalah Indeks Pembangunan Pemuda. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain

adalah Launching Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Sosialisasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Instrumen koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan di tingkat pusat dirumuskan melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kepemudaan, sedangkan di tingkat daerah instrumennya adalah Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan yang mengacu pada RAN. Agar pemerintah pusat dan daerah bisa memaksimalkan pelayanan kepemudaan maka diperlukan Index Pembangunan Pemuda (IPP) sehingga Pemerintah Pusat dan Daerah dapat memahami substansi koordinasi dan sinergi pelayanan kepemudaan di tingkat daerah serta mengevaluasi terkait perkembangan pembangunan kepemudaan.

Capaian Kinerja Jumlah Kementerian/Lembaga yang Terlibat Aktif Dalam Pencapaian Target RAN Pelayanan Kepemudaan



Capaian dan kegiatan yang mendukung meningkatnya kapasitas kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan yakni melalui rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah untuk peningkatan kapaisatas individu maupun kelembagaan dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
2.1	Jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan	10 K/L	27 K/L	270%	Melampaui target

Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi lintas K/L telah dibentuk Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sesuai pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang terdiri dari 28 K/L dan 4 Kementerian Koordinator dengan rincian sebagai berikut:

Pengarah :

Ketua : Wakil Presiden RI

Anggota :

1. Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Menko Bidang Perekonomian
3. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pelaksana

Ketua : Kemenpora

Anggota :

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Agama
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Kementerian Keuangan
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
7. Kementerian Kesehatan
8. Kementerian Sosial
9. Kementerian Ketenagakerjaan
10. Kementerian Perindustrian
11. Kementerian Perhubungan
12. Kementerian Komunikasi dan Informatika
13. Kementerian Pertanian
14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15. Kementerian Kelautan dan Perikanan
16. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
17. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
18. Kementerian Koperasi dan UKM
19. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20. Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak
21. Badan Riset dan Inovasi Nasional
22. Perpustakaan Nasional
23. Badan Pusat Statistik
24. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
25. Badan Narkotika Nasional
26. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
27. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



Selanjutnya anggota Tim Koordinasi Nasional (TKN) dibagi ke dalam kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yaitu domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi. Masing-masing anggota pokja bertugas untuk memastikan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui Matriks RAN Pelayanan Kepemudaan.

Di tahun 2023 telah dilaksanakan 2 (dua) kali rapat kelompok kerja yaitu:

1. Rapat kelompok kerja tanggal 17 Mei 2023, bertempat di Hotel Novotel Jakarta Mangga Dua Square, Ancol Jakarta. Tujuan rapat untuk membahas persiapan Rapat Tingkat Menteri (RTM);
2. Rapat kelompok kerja tanggal 26 – 28 Oktober 2023, bertempat di Hotel Shalva Tanah Abang Jakarta. Tujuan rapat untuk koordinasi, sinkronisasi, dan optimalisasi dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antar Kementerian/Lembaga berdasarkan domain yang telah ditetapkan.

Dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan melaksanakan tugas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas tim pelaksana koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, telah dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya

disebut Sekretariat Tim Koordinasi berdasarkan keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 124 Tahun 2023 tentang pembentukan sekretariat tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Di tahun 2023 telah dilaksanakan 4 (Empat) kali rapat sekretariat tim koordinasi, sebagai berikut:

1. Rapat sekretariat tim koordinasi tanggal 24 Maret 2023, bertempat di ruang rapat lt.3, Gedung Graha Kemenpora, tujuan rapat untuk membahas tugas dan fungsi tim sekretariat serta persiapan Rapat Tingkat Menteri (RTM);
2. Rapat sekretariat tim koordinasi tanggal 21 Juni 2023 melalui *Zoom Meeting*, tujuan rapat untuk membahas tugas pokok dan rencana kerja tim sekretariat dan tim kelompok kerja penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
3. Rapat sekretariat tim koordinasi tanggal 29 September 2023 melalui *Zoom Meeting*, tujuan rapat untuk membahas teknis persiapan rapat kelompok kerja tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan target penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) K/L;
4. Rapat sekretariat tim koordinasi tanggal 25 Oktober 2023 melalui *Zoom Meeting*, tujuan rapat untuk membahas teknis persiapan rapat kelompok kerja tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Untuk mencapai capaian IKU Jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan, Asisten Deputi Kemitraan Pemuda telah menetapkan Pagu Anggaran TA 2023 sebesar Rp 515.882.000,- dan realiasi yang tercatat adalah sebesar RP 509.380.000,- atau sebesar 98,74%.

Rincian Kegiatan	Pagu	Realisasi
Jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan	515.882.000	509.380.000
Persentase Realisasi terhadap Anggaran	98,74%	

Perbandingan jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan 2022 – 2023.

Jumlah Kementerian/Lembaga yang Terlibat Aktif dalam Pencapaian Target RAN Pelayanan Kepemudaan	
2023	28 K/L
2022	28 K/L

Jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN Pelayanan Kepemudaan tidak mengalami perubahan dari tahun 2022 hingga 2023. Hal ini dikarenakan 28 Kementerian/Lembaga (termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga) terikat di Perpres No 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Perpres ini pula yang menjadi kunci ketercapaian IKU 2.1.

Perpres No 43 Tahun 2022 menjadi semangat baru untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi kepemudaan di tingkat pusat dan daerah. Perpres ini mengatur tentang Koordinasi Stretagis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang bertujuan untuk meningkatkan 3 (tiga) hal utama:

- a. Efektivitas pelayanan kepemudaan;
- b. Sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan kepemudaan; dan
- c. Kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Indikator Kerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
a.	Jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan	270	98,74	26,46

Tingkat efisinesi untuk mencapai indikator jumlah kementerian/lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan adalah sebesar 26,46. Hal ini menunjukkan bahwa adanya efisiensi untuk mencapai IKU adalah sebesar 26,46.

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN IKU

Program atau kegiatan yang menunjang indikator indikator jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan adalah Rencana Aksi Nasional (RAN).

Koordinasi kepemudaan lintas sektoral Pusat-K/L-Swasta berkaitan dengan kegiatan Rapat Koordinasi yang melibatkan peserta dari kementerian/lembaga tingkat Pusat, kalangan akademisi, dan lembaga-lembaga swasta yang memiliki perhatian pada pembangunan kepemudaan, dan secara khusus mengenai Rencana Aksi Nasional (RAN).

Koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain karena Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2022 secara khusus mengamanatkan perlunya koordinasi lintas sektoral dalam pelayanan kepemudaan, hal penting lainnya yang perlu disadari bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak dapat melaksanakan sendiri tugas dan tanggung jawab membangun kepemudaan.

Sebagai leading sector pembangunan kepemudaan, Kemenpora mengambil posisi dan peran membangun sinergitas lintas sektoral, agar kementerian/lembaga kemudian memahami bahwa pembangunan kepemudaan merupakan tugas dan

tanggung jawab kolektif. Hal itu didukung dengan adanya anggaran kepemudaan yang tersebar di kementerian/lembaga terkait.



Capaian Kinerja Jumlah Provinsi yang Melakukan Penyusunan RAD Kepemudaan



No	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
2.2	Jumlah Provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan	27 Provinsi	28 Provinsi, 3 Kab/Kota	103,70%	Melampaui target

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan mengamanahkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan sebagai panduan atau arahan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan berupa dokumen yang memuat indikator sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas kepemudaan. Selain itu RAD juga menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian untuk berbagai

kegiatan kepemudaan.

Salah satu upaya yang dilakukan Kemenpora untuk memenuhi target 75% Pemerintah Daerah Provinsi telah menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan adalah:

1. Melaksanakan Sosialisasi penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan pada beberapa event kepemudaan;
2. Memberikan konsultasi kebijakan kepemudaan, implementasi koordinasi lintas sektor penyusunan RAD;
3. Pendampingan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan di Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Aceh, Lampung dan Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Pemberian insentif program untuk mendorong agenda pelayanan kepemudaan di daerah oleh unit-unit kerjasi Kemenpora;
5. Pemberian apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah selesai menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan;
6. Pemberian apresiasi terhadap pemerintah daerah dengan capaian IPP tertinggi.

Untuk mencapai capaian IKU Jumlah Provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan, Asisten Deputi Kemitraan Pemuda telah menetapkan Pagu Anggaran TA 2023 sebesar Rp 1.107.258.000,- dan realiasi yang tercatat adalah sebesar RP 1.013.101.015,- atau sebesar 91,50%.

Rincian Kegiatan	Pagu	Realisasi
Jumlah Provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan	1.107.258.000	1.013.101.015
Persentase Realisasi terhadap Anggaran	91,50%	

Perbandingan Jumlah Provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan tahun 2021 – 2023.

Jumlah Provinsi yang Melakukan Penyusunan RAD Kepemudaan	
2023	28 Provinsi, 3 Kab/Kota
2022	18 Provinsi
2021	8 Provinsi

Jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, pemerintah daerah yang menyusun penyusunan RAD adalah sebanyak 8 provinsi, antara lain: DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Riau.

Pada tahun 2022, pemerintah daerah yang menyusun penyusunan RAD adalah sebanyak 18 provinsi, antara lain: Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Maluku, Bangka Belitung, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

Pada tahun 2023, pemerintah daerah yang menyusun penyusunan RAD adalah

sebanyak 28 Provinsi, 3 Kabupaten/Kota. Terdapat 10 provinsi dan 3 kabupaten/kota yang telah selesai menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah. Sebanyak 18 Provinsi sedang dalam proses penyusunan yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Tercapainya IKU Jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan tidak terlepas dari mulai munculnya kesadaran pemerintah daerah untuk menyusun RAD Kepemudaan. Selain itu, pendampingan yang masif yang dilakukan oleh Asisten Deputi Kemitraan Pemuda dan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah menjadi stimulus dan pemicu provinsi lain untuk menyusun RAD Kepemudaan seperti yang diamanatkan dalam Perpres No 43 Tahun 2022.





ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Indikator Kerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
a.	Jumlah Provinsi yang Melakukan Penyusunan RAD Kepemudaan	103,70	91,50	12,20

Tingkat efisinesi untuk mencapai indikator jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan adalah sebesar 12,20. Hal ini menunjukkan bahwa adanya efisiensi untuk mencapai IKU adalah sebesar 12,20.

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN IKU

Program atau kegiatan yang menunjang indikator jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan adalah Pendampingan dan Pengawasan RAD.

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2022, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai leading sector koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan telah melaksanakan langkah-langkah implementatif, di antaranya berbagai kegiatan rapat koordinasi dan kolaborasi yang melibatkan kementerian/lembaga yang memiliki program atau kegiatan kepemudaan.

Koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan telah menjadi arah kebijakan dan strategi “peningkatan kualitas pemuda” sebagaimana ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Prioritas Nasional ke-3 “meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing”. Instrumen koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan di tingkat pusat dirumuskan melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kepemudaan, sedangkan di tingkat daerah instrumennya adalah Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan yang

mengacu pada RAN.

Pendampingan RAD oleh Asisten Deputi Kemitraan Pemuda tidak lepas dari terjalannya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah sehingga target provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan tercapai.

Capaian Kinerja Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan



No	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
2.3	Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan	75%	91,18%	121,57%	Melampaui target

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Berikut adalah pembagian tugas tim koordinasi daerah.

Di tingkat pusat telah dibentuk tim sekretariat dan tim kelompok kerja melalui:

- Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 124 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.



Rekapitulasi Penyusunan RAD dan Tim Koordinasi Provinsi/Kabupaten/Kota Pelayanan Kepemudaan

No	Provinsi	Status Penyusunan RAD	Tim Koordinasi
1	Aceh	Proses Penyusunan	√
2	Sumatera Utara	Selesai	√
3	Sumatera Barat	Selesai	√
4	Sumatera Selatan	Proses Penyusunan	√
5	Riau	Selesai	√
6	Kepulauan Riau	Proses Penyusunan	√
7	Bangka Belitung	Selesai	√
8	Jambi	Proses Penyusunan	√
9	Bengkulu	Proses Penyusunan	√
10	Lampung	Proses Penyusunan	√
11	Banten	Proses Penyusunan	√
12	DKI	Belum Menyusun	-
13	Jawa Barat	Selesai	√
14	Jawa Tengah	Proses Penyusunan	√
15	Jawa Timur	Selesai	√
16	DIY	Proses Penyusunan	√
17	Kalimantan Barat	Proses Penyusunan	√
18	Kalimantan Tengah	Proses Penyusunan	√

19	Kalimantan Selatan	Selesai	√
20	Kalimantan Timur	Selesai	√
21	Kalimantan Utara	Selesai	√
22	Bali	Proses Penyusunan	√
23	Nusa Tenggara Timur	Belum Menyusun	-
24	Nusa Tenggara Barat	Proses Penyusunan	√
25	Sulawesi Utara	Belum Menyusun	-
26	Sulawesi Tengah	Selesai	√
27	Sulawesi Barat	Belum Menyusun	-
28	Sulawesi Selatan	Proses Penyusunan	√
29	Sulawesi Tenggara	Belum Menyusun	-
30	Gorontalo	Proses Penyusunan	√
31	Maluku	Proses Penyusunan	√
32	Maluku Utara	Proses Penyusunan	√
33	Papua	Belum Menyusun	-
34	Papua Barat	Proses Penyusunan	√
35	Kota Baru	Selesai	√
36	Kabupaten Bengkalis	Selesai	√
37	Kota Malang	Selesai	√

Berdasarkan rekapitulasi diatas diperoleh data sebagai berikut :

1. Sebanyak 10 Provinsi dan 3 Kabupaten/Kota telah selesai menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan, 18 Provinsi sedang dalam proses penyusunan dan 6 provinsi belum menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan.
2. Sebanyak 28 Provinsi dan 3 Kabupaten/Kota telah membentuk Tim Koordinasi Provinsi Pelayanan Kepemudaan, sedangkan 6 provinsi belum membentuk Tim Koordinasi Provinsi Pelayanan Kepemudaan.

Rincian Kegiatan	Pagu	Realisasi
Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan	515.882.000	509.380.000
Persentase Realisasi terhadap Anggaran	98,74%	

Untuk mencapai capaian IKU Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan, Asisten Deputi Kemitraan Pemuda telah menetapkan Pagu Anggaran TA 2023 sebesar Rp 515.882.000,- dan realiasi yang tercatat adalah sebesar RP 509.380.000,- atau sebesar 98,74%.

Perbandingan Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan tahun 2021 – 2023.

Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan	
2023	30 Tim (91,18%)
2022	9 Tim
2021	9 Tim

Secara data, ada peningkatan jumlah tim koordinasi lintas sektor layanan dari tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan. Peningkatan tim ini diharapkan menjadi



ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Indikator Kerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
a.	Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan	121,57	98,74	22,83

Tingkat efisinesi untuk mencapai indikator persentase tim koordinasi lintas sektor layanan adalah sebesar 22,83. Hal ini menunjukkan bahwa adanya efesisiensi untuk mencapai IKU adalah sebesar 22,83.

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN IKU

Program atau kegiatan yang menunjang indikator persentase tim koordinasi lintas sektor layanan adalah Pendampingan dan Pengawasan RAD.

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2022, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai leading sector koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan telah melaksanakan langkah-langkah implementatif, di antaranya berbagai kegiatan rapat koordinasi dan kolaborasi yang melibatkan kementerian/lembaga yang memiliki program atau kegiatan kepemudaan.

Koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan telah menjadi arah kebijakan dan strategi “peningkatan kualitas pemuda” sebagaimana ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Prioritas Nasional ke-3 “meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing”. Instrumen koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan di tingkat pusat dirumuskan melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kepemudaan, sedangkan di tingkat daerah instrumennya adalah Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan yang mengacu pada RAN.

Pendampingan RAD oleh Asisten Deputi Kemitraan Pemuda tidak lepas dari terjalannya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah sehingga target provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan tercapai.



ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Asisten Deputi Kemitraan Pemuda telah melakukan efisiensi sumberdaya yaitu pemaksimalan SDM yang ada untuk mendukung performa kinerja dan anggaran organisasi yang lebih baik. Pagu awal Asisten Deputi Kemitraan Pemuda TA 2023 adalah sebesar Rp 15.916.288.000,-.

$$Efisiensi = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

Keterangan :

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

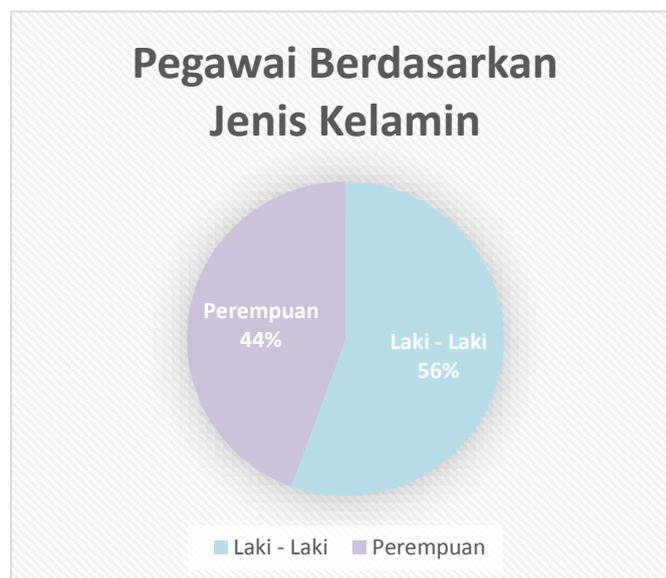
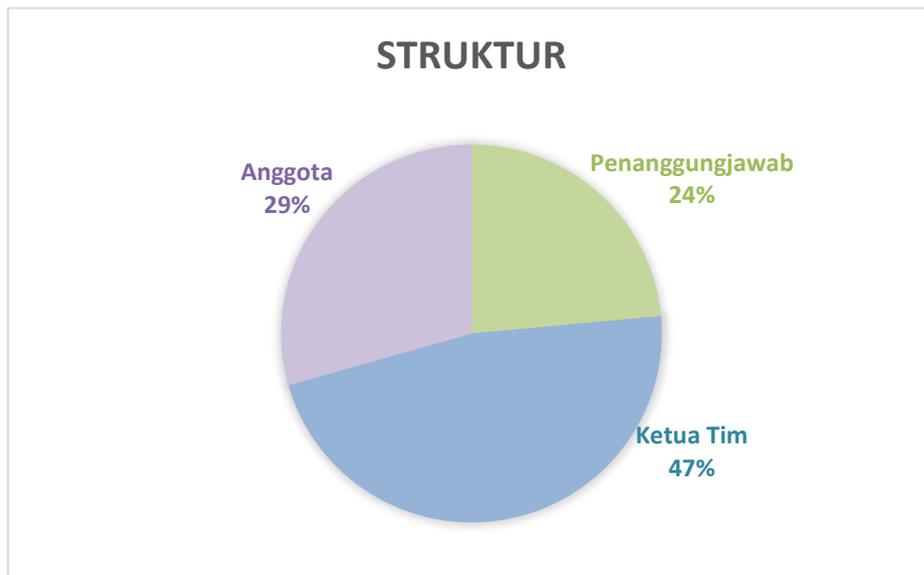
RAKi : Realisasi Anggaran keluaran i

CKi : Capaian Kinerja i

IKU	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
1.1	436	539	2.480.233.000	2.424.775.021
1.2	1	1	1.350.190.000	1.322.152.890
2.1	10	27	823.931.000	729.271.580
2.2	27	28	594.605.000	562.289.900
2.3	75	91,18	411.300.000	327.140.000

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh total persentase **efisiensi biaya sebesar 30,83%**. Efisiensi biaya tersebut, telah menghasilkan prestasi keberhasilan capaian yang cukup signifikan pada sasaran strategis, mencapai target-target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, dengan tetap menjaga kualitas kinerja.

Untuk dapat menjalankan efisiensi dan efektivitas sumber daya, peran sumber daya manusia sangat penting. . Dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup dan didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mampu mendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.



Kinerja sumber daya manusia ini adalah dengan mengoptimalkan tenaga yang ada dan memanfaatkan penggunaan program-program teknologi yang dapat membantu proses percepatan dan koordinasi pekerjaan. Disamping itu pula beberapa tenaga dari luar dioptimalkan penggunaannya sehingga dapat membantu beban kerja yang sifatnya teknis maupun administratif tentunya dengan pertimbangan yang baik sehingga tidak menjadi beban negara namun tetap efektif dan efisien dalam pemanfaatannya. Dengan langkah tersebut efisiensi, efektivitas dan stabilitas kinerja kegiatan dapat terjaga sehingga dapat mendukung pencapaian program.

REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp 15.916.288.000,- (Lima Belas Miyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).**

Kode Kegiatan	Nama Komponen	Anggaran	Realisasi	Capaian
6970	Rencana Aksi Nasional	735.604.000	729.600.000	99,18%
6970	Pendampingan dan Pengawasan RAD	995.160.000	901.003.045	90,54%
6970	Index Pembangunan Pemuda	843.978.000	839.220.927	99,44%
6970	Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 2023	5.432.009.000	5.406.303.288	99,53%
6970	ASEAN Youth Interfaith Camp 2023	1.192.274.000	1.190.770.400	99,87%
6970	Fasilitasi Pengiriman Delegasi pada Event-Event Internasional	1.413.980.000	1.154.918.083	81,68%
6970	Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) 2023	3.158.618.000	3.144.754.295	99,87%
6970	Bantuan Event-Event dan Pengiriman Delegasi Meeting Kepemudaan tingkat Internasional	200.000.000	183.000.000	91,50%
6970	Program Internasional Kapal pemuda ASEAN-JEPANG (SSEAYP)	895.042.000	871.561.139	97,38%
3812	Rencana Aksi Nasional	296.160.000	289.160.000	97,64%
3812	Pendampingan dan Pengawasan RPD	112.098.000	112.097.970	100%
3812	Persiapan dan Seleksi Peserta	53.165.000	53.150.000	99,97%
3812	Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 2023	76.374.000	76.374.000	100%
3812	Fasilitasi Pengiriman Delegasi pada Event-Event Internasional	511.826.000	485.958.686	94,95%
Total		15.916.288.000	15.437.871.833	96,99%

Perbandingan realisasi anggaran Asisten Deputi Kemitraan Pemuda dari tahun 2021 – 2023 adalah sebagai berikut:

Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
8.500.000.000	8.337.291.131	14.251.468.000	14.251.468.000	15.916.288.000	15.437.871.833
98,09%		84,69%		96,99%	

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran tahun 2023 dengan realisasi anggaran tahun 2022 ada peningkatan sekitar 12,3%. Dan ada penurunan sekitar 1,1% antara realisasi tahun 2023 dan 2021. Peningkatan realisasi dari tahun 2022 ke 2023 sejalan dengan target kinerja yang meningkat baik secara kuantitas dan kualitas.

BAB IV PENUTUP

SIMPULAN

Laporan Kinerja Asisten Deputi Kemitraan Pemuda tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan, unit terkait, dan stakeholder atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan gambaran capaian keberhasilan atau kegagalan kinerja. Selain itu, LKj ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perencanaan dan pengembangan program/kegiatan pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda.

Sasaran Kegiatan Asisten Deputi Kemitraan Pemuda meliputi 2 pokok penting, yakni meningkatnya pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan dan meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi pelayanan kepemudaan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan dan kesepakatan internasional	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional	436 Orang	539 Orang	123,62%
	Jumlah koordinasi dengan stakeholder kemitraan pemuda	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi pelayanan kepemudaan	Jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan	10 Orang	27 K/L	270%
	Jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	27 Provinsi	28 Provinsi, 3 Kabupaten/Kota	103,70%
	Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan	75%	91,18%	121,57%

Laporan Kinerja Asisten Deputi Kemitraan Pemuda menyampaikan tercapainya 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dalam 2 (dua) Sasaran Strategis. Pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional pada tahun 2023 mencapai 539 orang atau sekitar 123,62% dari target. Koordinasi dengan stakeholder kemitraan pemuda mencapai 100% dari target.

Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan mencapai 27 K/L dan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai ketua. Hal ini menunjukkan capaian sekitar 270% dari target awal yang ditetapkan. Provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan pada tahun 2023 mencapai 28 Provinsi dan 3 Kabupaten/Kota atau mencapai sekitar 103,70% dari target. Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan mencapai 91,18% atau sekitar 121,57%. Langkah selanjutnya ialah dilakukan upaya untuk menyamakan persepsi terkait permasalahan dimaksud baik secara internal dan eksternal di antaranya adalah melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan juga dilakukan upaya pendampingan yang lebih intens terhadap pemerintah daerah yang sedang menyusun RAD maupun daerah yang belum menyusun RAD.

Daya serap anggaran pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda tahun 2023 mencapai angka 96,99% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar 3,01% dari total anggaran sebesar Rp. 15.916.288.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.437.871.833,- dan tidak terealisasi sebesar Rp 478.416.167,-.

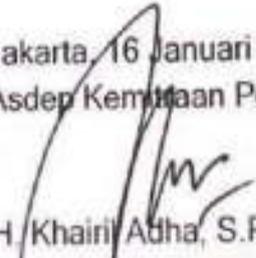
REKOMENDASI

Beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder guna memperhatikan dan meningkatkan kinerja Asisten Deputi Kemitraan Pemuda.
2. Mempertahankan kinerja anggaran yang sudah baik dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas.
3. Sumber daya manusia yang mumpuni untuk dapat catch up perkembangan jaman dan teknologi serta penuh inovasi sehingga dapat melakukan pendampingan dan dukungan yang prima bagi kinerja, khususnya di Asisten Deputi Kemitraan Pemuda.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan pada tahun berikutnya akan dapat diraih capaian kinerja sasaran yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan. Besar harapan kami bahwa LKj Asisten Deputi Kemitraan Pemuda tahun 2023, dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Jakarta, 16 Januari 2024
Asdep Kemitraan Pemuda



H. Khairil Adha, S.Pd., M.Si
NIP. 19771120 200312 1 004

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Calon tingkat mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada outcome, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: H. Khairi Adha, S.Pd, M.Si
Jabatan: Asisten Deputi Kemitraan Pemuda

sebagainya diwakili pihak pertama

Nama: Dr. Raden Iswanta, M.Pd
Jabatan: Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mencapai target kinerja
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala seperti pihak kedua
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegiatan yang terkait.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang ditunjukkan dari perjanjian ini
2. Menyalurkan indikator yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua,

Dr. Raden Iswanta, M.Pd

Pihak Pertama,

H. Khairi Adha, S.Pd, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 ASISTEN DEPUTI KEMITRAAN PEMUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan dan kegiatan internasional	1.1 Jumlah pemuda kulit yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional	400 Orang
		1.2 Jumlah koordinasi dengan stakeholder kemitraan pemuda	1 Dikunjungi
2	Meningkatnya kapasitas keterampilan dan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan	2.1 Jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target SDG pelayanan kepemudaan	10 KL
		2.2 Jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAO pelayanan kepemudaan	27 Provinsi kepemudaan
		2.3 Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan	75%

Kegiatan :

Pengembangan Kemitraan Pemuda

Anggaran :

Rp. 15.015.285,000

Jakarta, September 2023

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda,

Dr. Raden Iswanta, M.Pd

Asisten Deputi Kemitraan Pemuda,

H. Khairi Adha, S.Pd, M.Si







